

HARIAN

LENTERA*Inspirasi Perubahan* **TODAY**HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

Why should we care
about what people think
who we are, I am who I
am, and who I wanna be

Avril Lavigne, singer-songwriter

EDISI SELASA / 14 Juli 2020

BERHARAP 'KESAKTIAN' TERAWAN DI SURABAYA

Ironis, DKI Jakarta dan Jawa Timur (Jatim) adu balap jumlah kasus Covid-19. Per 13 Juli, jumlah penambahan kasus positif baru DKI tertinggi di Indonesia yaitu 281 kasus, Jatim diurutan kedua dengan 219 kasus. Tapi, dari total kumulatif, Jatim lah yang menjadi jawaranya yaitu sebanyak 16.887 kasus. DKI giliran mengambil posisi runner up dengan total 14.797 kasus. Berbagai 'hotspot' penyebaran baru pun muncul di Jatim. Mulai dari kelompok tenaga kesehatan (nakes), dimana 3 dokter meninggal karena Covid. Ada juga pekerja media dengan 2 korban meninggal serta 3 positif corona dan lebih dari 50 orang terpapar. Makin merah pekatnya kondisi di provinsi paling timur Pulau Jawa, akhirnya membuat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 'ngantor' di Surabaya.

Baca Hal 11

6 DAERAH DENGAN KASUS TERBESAR

- **Jawa Timur**
Kasus : 16,877, Sembuh : 6.609, Meninggal : 1.226
- **DKI Jakarta**
Kasus : 14.797, Sembuh : 9.408, Meninggal : 697
- **Sulawesi Selatan**
Kasus : 7.097, Sembuh : 3.018, Meninggal : 226
- **Jawa Barat**
Kasus : 5.160, Sembuh : 1.896, Meninggal : 186
- **Jawa Tengah**
Kasus : 5.573, Sembuh 1.965, Meninggal : 240
- **Kalimantan Selatan**
Kasus : 4.218, Sembuh : 1.410, Meninggal : 221



UPDATE PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

| | KASUS POSITIF | SEMBUH | MENINGGAL DUNIA |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| INDONESIA | 76,981 | 36,689 | 3,656 |
| Seluruh Dunia | 12,910,357 | 7,116,957 | 569,128 |

Update : 13 Juli 2020 Pukul 15.45 PM
Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins



Bupati Blitar, Rijanto menyerahkan bantuan sosial tahap 2 bagi warga terdampak Covid-19

Blitar - Jumlah warga penerima Bantuan Sosial (Bansos) Dampak Covid-19 Tahap 2 di Kabupaten Blitar bertambah sekitar 27.000 orang. Angka ini melonjak 50 persen lebih dibanding tahap 1. Sebab, Pemkab menampung berbagai masukan dari kepala desa yang memiliki warga terdampak corona dan belum memperoleh bantuan.

Adanya tambahan penerima Bansos Tahap 2 ini disampaikan langsung oleh Bupati Blitar, Rijanto jika saat ini Pemkab Blitar mulai menyalurkan Bansos Tahap 2, berupa sembako senilai Rp 200.000 per paket kepada warga terdampak Covid-19. "Bansos ini diberikan khusus kepada warga yang terkena dampak Covid-19, serta belum mendapat

PENERIMA BANSOS TAHAP 2 DI KABUPATEN BLITAR MELONJAK 50% LEBIH

bantuan lainnya dari pemerintah," tutur Bupati Rijanto dikutip Senin (13/7).

Jumlah penerima Bansos Tahap 2 juga bertambah cukup besar, jika tahap 1 sebanyak 42.296 orang. Pada tahap 2 ini bertambah menjadi 60.986 orang, bahkan diperkirakan bisa bertambah hingga mencapai 70.000 orang. "Karena saat ini masih ada beberapa kecamatan, yang sedang melakukan verifikasi data," paparnya.

Melonjaknya jumlah penerima Bansos Tahap 2 ini, dijelaskan Bupati Rijanto sesuai dengan masukan dari para kepala desa yang menyampaikan jika banyak warganya yang belum mendapat bantuan. "Baik PKH, BPNT, BST maupun Bantuan Tunai DD, maka seluruhnya saya minta dimasukkan," jelasnya.

Adapun paket sembako Bansos Tahap 2 sama dengan Tahap 1, diantaranya berisi beras 10 kg, telur 15 butir, produk UKM/IKM Blitar seperti sambal pecel dan kue kering. Sedangkan Bansos dampak Covid-19 ini bersumber dari APBD, serta direncanakan diberikan

3 tahap.

Jadi dari hasil verifikasi dan validasi data, diketahui masih banyak warga terdampak Covid-19 yang belum menerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. "Saya minta para kepala desa terus melakukan verifikasi data, untuk mengantisipasi adanya warga yg sama sekali belum menerima bantuan dari pemerintah," tandas bupati yang akan maju lagi periode kedua ini.

Ditanya mengenai mekanisme pembagian Bansos Tahap 2, terkait penerapan protokol kesehatan. Bupati Rijanto mengaku diserahkan sepenuhnya kepada pihak desa, bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas. "Jadi sudah diatur jadwal pembagian dan antriannya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," ungkapnya.

Selain itu ditambahkan Bupati Rijanto, dengan diserahkan kepada pihak desa maka jika ada yang terlewat atau salah data bisa langsung disampaikan ke kades. "Sehingga bisa cepat diselesaikan di tingkat desa, untuk di lakukan up date datanya," imbuhnya. (ais)



BPB Linmas menggelar rapat dengan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) se-Surabaya terkait operasi masker

Surabaya-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Salah satu langkahnya adalah menurunkan semua pegawai di Kecamatan dan Kelurahan untuk melakukan operasi masker.

"Jadi, ini pasti akan lebih masif gerakannya, apalagi nanti semua karyawan kecamatan dan kelurahan akan turun secara serentak," kata Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto, di kantornya, Senin (13/7).

Untuk diketahui, dalam menertibkan dan menegakkan Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya melakukan gerakan massif yang melibatkan jajaran kepolisian dan

OPERASI MASKER, PEMKOT TURUNKAN SEMUA PEGAWAI KECAMATAN & KELURAHAN

TNI. Target operasinya adalah pasar-pasar tradisional, moda transportasi darat, dan warung-warung atau tempat-tempat makan dan tempat nongkrong, serta ke semua wilayah permukiman dan perkampungan. Terbaru, pemkot melibatkan semua karyawannya di kecamatan dan kelurahan untuk mengintensifkan operasi penggunaan masker ini.

"Bersama jajaran kecamatan, kelurahan, koramil, polsek, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta satgas-satgas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di wilayah mereka masing-masing kita bergerak bersama," katanya.

Kepala BPB Linmas mengatakan, hari ini dia bersama jajarannya menggelar rapat dengan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) se-Surabaya. Rapat yang digelar di kantor BPB Linmas itu membahas tentang mekanisme operasi, termasuk sasaran operasi di wilayah mereka masing-masing. "Khusus wilayah yang zona merah, nanti kita lebih prioritaskan. Bahkan nanti petugas Linmas akan membantu di zona merah itu," kata dia.

Tujuannya untuk memastikan terbentuknya Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di masing-masing wilayah RW, dan memastikan Satgas

Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo (Wani Sehat, Wani Sejahtera, Wani Jogo, Wani Ngandani) berjalan sesuai tugas masing-masing, terutama yang ada di zona merah. "Nanti mereka juga harus memastikan dan melakukan blocking area di wilayah yang terdapat pasien terkonfirmasi positif Covid-19," tegasnya.

Dalam operasi ini juga akan dilakukan pembagian ribuan masker kepada warga Kota Surabaya. Nantinya, sasarannya adalah seluruh area permukiman penduduk, terutama area yang terdapat pasien terkonfirmasi Covid-19.

"Operasi ini akan dilakukan mulai 14 Juli sampai 16 Juli. Sedangkan waktunya, pada Hari Selasa pada pukul 15.00-17.00 WIB, kemudian Rabu mulai pukul 08.00-10.00 WIB, dan Kamis mulai pukul 19.00-21.00 WIB," tegasnya.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh warga Kota Surabaya untuk selalu mematuhi semua protokol kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Perwali nomor 28 tahun 2020. Bahkan, ia juga meminta warga untuk selalu ingat jargon 'Biasakan yang Tidak Biasa'. "Mari kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini dengan patuhi semua protokol kesehatan, dan selalu biasakan yang tidak biasa," pungkasnya. (ard)

DPR RI DESAK **PEMBENTUKAN PANSUS DJOKO TJANDRA**

Jakarta – Fraksi Demokrat dan NasDem DPR RI mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait kasus Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Pansus tersebut diusulkan karena kasus Djoko Tjandra melibatkan banyak instansi.

Pembentukan Pansus Djoko Tjandra diusulkan Fraksi Demokrat terlebih dahulu dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting. Adalah anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny K Harman yang melontarkan usulan tersebut.

"Jawaban Pak Dirjen ini kan boleh dibilang tidak memberikan penjelasan atas apa yang ditanya. Oleh sebab itu, dengan penjelasan tadi, banyak sekali institusi yang terkait. Saya mengusulkan, kesimpulan rapat ini Komisi III ini supaya mengagendakan usulan pembentukan pansus, Pansus Djoko Tjandra. Sebab kalau begini saja, Pak Dirjen nggak bisa, kasihan beliau ini, pasang badan dia untuk hal yang dia tidak tahu," kata Benny dalam RDP yang digelar di ruang rapat Komisi III, kompleks parlemen, Jakarta, Selatan, Senin (13/7).

Usulan pembentukan Pansus Djoko Tjandra kemudian ditanggapi oleh anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufik Basari. Dia menyebut Fraksi NasDem setuju dengan pembentukan Pansus Djoko Tjandra. "Untuk menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Pak Benny mengenai usulan pansus, kami kalau dari NasDem setuju-setuju saja. Mohon dijawab juga," tutur Basari.

Ketua Komisi III Herman Herry menyebut usulan pembentukan pansus merupakan hak anggota DPR. Herman menyatakan usulan tersebut akan dibicarakan dalam rapat internal Komisi III. "Terkait apapun yang usulkan oleh para anggota, itu adalah hak anggota, dan ke-

bijakan itu akan kita bicarakan di rapat internal kita," sebut Herman.

Hingga kini keberadaan Djoko Tjandra belum diketahui. Tapi faktanya, Djoko Tjandra bisa membuat KTP elektronik atau e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan pada 8 Juni 2020 dan membuat paspor pada 27 Juni 2020.

Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali. Pada 3 Juli 2020, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi perihal permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Djoko Tjandra.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari meminta Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengungkap adanya dugaan jaringan mafia hukum dalam kasus Djoko Tjandra yang bisa keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi.

"Djoko Tjandra tidak mungkin sendirian, tidak mungkin urus hal-hal kecil sendirian, pasti melibatkan orang dengan kualifikasi tertentu. Ini keterlibatan jaringan hukum, ini harus dibongkar," kata Taufik Basari dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7).

Dia menduga ada jaringan mafia dalam kasus Djoko Tjandra, termasuk membantu buronan kasus hak tagih Bank Bali itu bisa dengan mudah keluar masuk Indonesia.

Taufik menilai kejadian Djoko Tjandra bisa memperoleh paspor Indonesia, padahal yang bersangkutan sudah menjadi warga negara asing, merupakan hal yang memalukan bukan hanya bagi penegak hukum namun bagi Komisi III DPR RI.

"Ini tamparan bagi kita, memalukan sekali, bukan hanya penegak hukum dan Polri, tapi kami juga malu karena dikerjai Djoko Tjandra. Pihak kejaksaan dan Polri

JEJAK BURONAN DJOKO TJANDRA DI INDONESIA

AWAL MEI 2020

Djoko Tjandra diperkirakan tiba di Indonesia dari Luar Negeri. Ada dua skenario Dia masuk dari Malaysia atau dari Papua Nugini

8 JUNI 2020

Djoko datang pagi-pagi ke kantor Lurah Grogol Selatan lalu menuju ke PN Jakarta Selatan untuk mendaftarkan peninjauan

7 JUNI 2020

Pengacara Kolopaking menghubungi Djoko soal rencana pembuatan KTP Elektronik baru di Kelurahan Grogol Selatan

22 JUNI 2020

Djoko pergi ke kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk memperpanjang Paspor Indonesia

AKHIR JUNI 2020

Djoko diperkirakan sudah meninggalkan Indonesia



mencari namun perlu peran imigrasi, ini kecolongan, bilang ini sulit namun apa yang bisa dilakukan," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu menduga tidak mungkin buronan "kelas kakap" seperti Djoko Tjandra mengurus paspor sendiri dengan mendatangi kantor imigrasi, pasti ada pihak-pihak yang mendukungnya.

Menurut dia, pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham harus mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dalam pembuatan paspor Djoko Tjandra tersebut, sehingga diharapkan ada langkah "bersih-bersih" yang dilakukan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Djoni Ginting.

"Djoko Tjandra tidak mau konyol dengan datang ke kantor imigrasi lalu ditangkap, pasti semua dipersiapkan dengan mulus, dari tempat menginap hingga datang ke kantor imigrasi. Jam berapa harus datang, siapa yang melayani di kantor imigrasi, lalu jalur mana yang digunakan," katanya pula. (ist)

DPRD SURABAYA SOROTI PEMKOT **SOAL PENDIDIKAN DAN INFRASTRUKTUR**

Surabaya-DPRD Surabaya memberi masukan ke Pemkot terutama di sektor pendidikan dan Infrastruktur. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dilakukan pada Senin (13/7).

"Secara umum catatan untuk OPD penekannya pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur kemudian pada pelayanan publik dan pada pekerja BUMD," ujar Wakil Ketua DPRD Reni Astuti saat ditemui usai rapat.

Reni mencontohkan di bidang pendidikan, perhatian yang diberikan oleh Pemkot Surabaya harus merata ke seluruh sekolah, baik swasta maupun negeri. "Tidak semua anak di Surabaya tertampung di sekolah negeri oleh karena itu menjadi kewajiban juga pemkot untuk memperkuat layanan pendidikan berkualitas dan terjangkau di semua sekolah," jelasnya.

Tak hanya soal pendidikan, Infrastruktur juga menjadi poin penting. Masukan dari DPRD terkait dengan penanganan pembangunan di semua wilayah adalah dibuatkan perda yang mengaturnya. "Sehingga diharapkan ini jadi perhatian apakah memang penguatan di dalam regulasi penanganan banjir memang perlu dituangkan dalam perda supaya terjadi konektivitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Misal pembangunan saluran dalam konteks pencegahan banjir yang berkelanjutan," terangnya.

Sebab, lanjut Reni, fenomena yang terjadi di Surabaya adalah ketika suatu wilayah daerah A dilakukan pembenahan infrastruktur sehingga tidak menyebabkan banjir maka banjirnya pindah ke wilayah B.

"Itu yang kita perkuat, catatan dari pansus memberikan masukan-masukan atas kondisi yang ada di wilayah masing-



Wakil Ketua DPRD Reni Astuti

masing, dimana pembangunan di wilayah tersebut belum tuntas 100 persen. Apa yang menjadi catatan DPRD menjadi bentuk representasi dari suara masyarakat ketika teman-teman turun ke masyarakat dan mendapat pengaduan. Itu yang menjadi input," jelasnya. (ard)

OPERASI PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA BLITAR

MASIH ADA YANG 'NGEYEL' TIDAK PAKAI MASKER

Blitar - Petugas Gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Blitar menggelar Operasi Patuh Protokol Kesehatan, terkait penerapan Peraturan Walikota (Perwali) tentang New Normal (Kenormalan Baru). Operasi ini bertujuan mendisiplinkan warga Kota Blitar, agar mematuhi protokol kesehatan. Sasarannya adalah pusat keramaian atau kerumunan warga, terutama para remaja yakni warung internet (warnet).

Seperti di sebuah warnet di Jl. Dr Wahidin Kota Blitar, puluhan petugas gabungan langsung menyasar masuk mengecek pengunjung warnet. Ternyata benar masih banyak remaja yang rata-rata usia sekolah, ditemukan tidak menggunakan masker. Padahal sesuai Perwali No 47 tahun 2020 tentang protokol kesehatan, merupakan hal yang wajib ketika beraktifitas di luar rumah.

Oleh petugas bagi yang tidak menggunakan masker langsung diberikan sanksi push up, sebagai sanksi sosial dan memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar. Sementara pemilik usaha (warnet) juga mendapatkan peringatan dari petugas, agar menerapkan protokol kesehatan. Dengan memasang peringatan wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Bagi pemilik tempat usaha yang membiarkan pengunjung tidak mematuhi pro-

tolok kesehatan, serta tidak memberikan peringatan juga akan diberikan sanksi. Mulai dari peringatan, sampai terberat menutup sementara usahanya. "Kita sudah melakukan sosialisasi dan himbauan pada masyarakat, beberapa minggu sebelumnya agar mematuhi protokol kesehatan," ujar KA SPKT Polres Blitar Kota Ipda Yuno Sukaito yang memimpin kegiatan pen-disiplinan, Senin (13/7).

Lebih lanjut dijelaskan Ipda Yuno sebelum diterapkannya Peraturan Walikota (Perwali) Blitar No 47 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan, kini setelah diterapkan bagi yang melanggar dan tidak mematuhi langsung diberikan sanksi. "Tidak hanya warga, namun pemilik usaha juga akan kena sanksi jika membiarkan pengunjung masuk tanpa mematuhi protokol kesehatan," jelasnya.

Sementara hasil razia dari 3 Warnet di 3 titik yaitu di Jl. Dr Wahidin, Jl. Ciliwung dan Jl. Tanjung, belasan remaja yang tidak memakai masker langsung dihukum push up.

Sebelumnya disampaikan Walikota Blitar, Santoso penerapan Perwali tentang Protokol Kesehatan di masa New Normal, sudah mulai dilakukan di Kota Blitar. Adapun isi dari Perwali itu selain mengatur sanksi bagi masyarakat, juga mengatur sanksi bagi pengusaha atau pengelola tempat wisata yang melanggar protokol



Petugas Gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Blitar menggelar Operasi Patuh Protokol Kesehatan di tengah wabah Covid-19

kesehatan. "Pengelola tempat usaha, wisata dan tempat publik harus menyediakan sarana protokol kesehatan saat beroperasi kembali," kata Walikota Santoso.

Mengenai sanksinya bervariasi tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan, untuk tempat usaha dan tempat wisata sanksi berupa teguran hingga 3 kali sampai penutupan sementara usahanya. "Bagi tempat usaha dan tempat wisata yang melanggar protokol kesehatan ada sanksi teguran pertama, kedua, ketiga, sampai penutupan sementara," tandasnya.

Oleh karena itu Pemkot Blitar bekerjasama dengan TNI-Polri dan petugas terkait untuk mengawasi penerapan Perwali ini, petugas akan gencar melaksanakan patroli mendisiplinkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. (ais)

BUKA MPLS, WALIKOTA MADIUN PASTIKAN SEKOLAH TETAP VIA DARING

Madiun - Meski membuka masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tingkat Sekolah dasar (SD) - Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bumi Perkemahan PDAM Ngrowo Bening, tapi Walikota Madiun, Maldi memastikan bila sekolah belum akan dilakukan secara tatap muka. Kegiatan belajar mengajar masih akan dilakukan via daring/online akibat pandemi Covid-19 hingga ada izin dari pemerintah keluar.

"Ini hanya perwakilan dari berbagai jenjang, materi yang disampaikan tetap di rumah," jelas Maldi, di sela acara Senin (13/07).

Untuk diketahui, acara pembukaan MPLS Tahun 2020/2021 diikuti perwakilan dari Guru dan siswa/i SD - SMP dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Lebih lanjut dirinya memaparkan bahwa dirinya membentuk 'Duta Pendekar Waras Kecil' dari siswa-siswi tersebut. Diharapkan Pendekar Waras Kecil tersebut dapat memberikan edukasi kepada teman-teman sebayanya terkait pentingnya protokol kesehatan. "Yang memberi tahu biar dari anak-anak kepada anak-anak. Bukan dari Ibu Guru. Jadi bisa lebih mengena," tutur Maldi.

Rencananya ada satu grup perwakilan dari setiap sekolah yang akan keliling

dengan difasilitasi. Menggunakan bus wisata dilengkapi sound system, menuju ke tempat ramai dengan tujuan memberikan edukasi ke masyarakat dan anak-anak secara langsung.

"Satu grup tersebut akan ke tempat ramai untuk memberikan edukasi ke masyarakat dan anak-anak secara langsung, terkait apa yang dia lakukan untuk menangkal Covid-19 di sekolah," jelasnya.

Kepada tenaga pendidik, wali kota mengingatkan untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Tujuannya untuk menjaga diri sendiri, keluarga dan siswa. "Jangan sampai ASN yang harusnya menjadi contoh untuk anak-anak malah melanggar protokol kesehatan," tegas Wali Kota Madiun Maldi saat sambutan pembukaan MPLS tahun ajaran baru 2020/2021 di Kota Madiun.

Maldi menjelaskan bahwa bagaimana-pun caranya, meski berdampingan dengan Covid-19, tetapi ilmu harus tetap terserap oleh siswa-siswi. Diketahui sebelumnya bahwa sarana dan prasarana sekolah sudah lengkap dan telah menggunakan protokol pencegahan Covid-19. Selain itu telah dilakukan rapid test kepada Kepala Sekolah, guru dan staff pendidikan.

Namun demikian, Maldi tetap ingin memperhitungkan kondisi yang ada



Walikota Madiun, Maldi ikut mengatur peserta pembukaan MPLS agar menjaga jarak

dengan membicarakannya kepada Komite Sekolah dan orangtua murid. "Berbicara dengan orangtua siswa itu artinya kalau anak-anak masuk, apa yg kira-kira kita lakukan bersama? apakah anak2 kita rapid semua? apakah protokol kesehatan kita perketat?, tentunya semua itu dibicarakan dgn komite," tutur Maldi.

Mantan Sekda tersebut juga menyampaikan, hari ini telah dilakukan pembagian seragam gratis dengan ongkos jahit untuk siswa/i SD-SMP seluruh Kota Madiun. "Mulai besok laptop sudah saya bagi. Seragam gratis sudah saya bagi mulai hari ini sekalian sama ongkos jahitnya," pungkasnya. (Ger)

ANGGARAN PILKADA 2020, KPU: BARU 113 DAERAH DITRANSFER, 157 BELUM

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat hanya 113 dari 270 daerah yang sudah sepenuhnya mentransfer anggaran Pilkada 2020 kepada penyelenggara pemilihan. Artinya ada 157 daerah yang belum menerima anggaran pesta demokrasi tersebut.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa hingga kini belum seluruh daerah peserta Pilkada mencairkan anggaran sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp 9,1 triliun. "Belum semua [mencairkan]. 113 daerah sudah 100 persen [mentransfer]," katanya, Senin (13/7).

Adapun anggaran Pilkada yang disepakati secara total mencapai Rp 15 triliun. Namun, sebagian dari anggaran tersebut telah dipakai pada 5 tahapan Pilkada sebelum ada pandemi Covid-19.

Alhasil anggaran Pilkada tersisa mencapai Rp 9,1 triliun dengan Rp 5,9 triliun sebelumnya telah digunakan pada tahapan awal. Pun demikian KPU mendapatkan tambahan dana untuk pengadaan alat pelindung diri bagi penyelenggara Pemilu dan pemegang hak suara senilai Rp 5,1 triliun.

Dia mengatakan, KPU akan segera

melakukan koordinasi dengan para pihak agar dana sisa dapat dikirim seluruhnya sebelum 15 Juli 2020. Pada waktu tersebut, KPU memulai tahapan pemutakhiran data pemilih. "Kami optimis (anggaran Pilkada akan ditransfer sebelum 15 Juli)," terangnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri terus mendorong daerah segera mencairkan anggaran Pilkada 2020. Dana tersebut akan digunakan oleh penyelenggara termasuk KPU, Bawaslu maupun aparat keamanan.

"Kemendagri terus mendorong agar Pemda mentransfer 100 persen NPHD-nya sebelum tanggal 15 Juli 2020, bahkan kalau bisa, lebih cepat lebih baik, agar penyelenggara bisa melaksanakan tahapannya dengan lancar," kata Plt. Dirjen Keuangan Daerah Mochammad Ardian.

Dana Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 9 Juli 2020 mencatat, total anggaran sementara pendanaan dan pencairan Pilkada Serentak Tahun 2020 sebesar Rp 15.04 triliun. Adapun dana yang telah direalisasikan senilai Rp 9 triliun atau 59,88 persen. Sementara, sisa pencairan anggaran menyentuh angka Rp 6,03 triliun atau 40,12 persen.

SUNTIKAN DANA PILKADA 2020 DI TENGAH COVID-19

Rp 4,678 Triliun
— Komisi Pemilihan Umum/KPU

Rp 478,9 Triliun
— Badan Pengawasan Pemilu/Bawaslu

Rp 39 Miliar
— Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP

PERTIMBANGAN

- 270 Daerah Mulai Tahapan Pilkada Serentak 15 Juni 2020 hingga Pencoblosan 9 Desember 2020
- Menjamin pelaksanaan Pilkada Serentak Berpedoman Protokol Kesehatan Covid-19

TAHAP PENCAIRAN UNTUK KPU

Tahap I
Rp 1,02 Triliun pada Juni 2020

tahap II & III
Diputuskan Kemendagri Bawaslu, DKPP, Gugus tugas penanganan Covid-19 Paling Lambat 17 Juni 2020



- Hak Pilih Pasien Covid-19 Dijamin
- Petugas Pakai Alat Pelindung Diri/APD Datangi Pasien Dirawat di RS
- 1 Bilik Khusus di Tempat Pemungutan Suara, TPS untuk Warga dengan Keluhan Kesehatan
- Bilik Suara Dipisah untuk Minimalkan Risiko Penularan Covid-19
- Rencana Pakai Ppet untuk Teteskan Tinta Ungu ke Jari Pemilih

"Anggaran ini segera dicairkan agar KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan sebagai komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi Pilkada ini gerakannya maksimal, oleh karena itu anggaran biaya ini harus segera dipenuhi," ujarnya. (Ist)

BAWASLU SUDAH MEMPROSES 559 KASUS PELANGGARAN PILKADA 2020

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah memproses 752 kasus dugaan pelanggaran Pilkada yang terdiri dari 630 temuan dan 122 laporan. Dari jumlah tersebut, 153 di antaranya terbukti bukan pelanggaran.

"Kami ingin sampaikan bahwa sampai tanggal 3 Juli 2020 kami sudah memproses 630 temuan dan 122 laporan," ujar Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dikutip Senin (13/7).

Dia memerinci, setelah Bawaslu menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran, ada 163 kasus termasuk pelanggaran administrasi. Tren pelanggaran yang sering dilakukan ialah anggota panitia pemungutan suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak memenuhi persyaratan.

Kemudian, 31 kasus merupakan pelanggaran kode etik. Tren pelanggaran-nya kategori ini adalah anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menjadi pengurus partai politik dan memberi dukungan kepada bakal pasangan calon kepala daerah.

Selain itu, ada empat kasus pelanggaran yang masuk ranah tindak pidana. Menurut Ratna, pelanggaran ini terjadi karena seseorang menghilangkan hak orang lain menjadi pasangan calon dan memalsukan dukungan pasangan calon perseorangan.

Ratna mengatakan, proses penanganan tindak pidana pemilu di Kepulauan Aru, Maluku, Waropen, Papua, Supiori, Papua, dan Rejang Lebong, Bengkulu telah memasuki tingkat penyidikan.

Kasus di Waropen pasal yang dikenakan adalah Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ketentuan itu menyebutkan, kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Kasus di Supiori dikenakan Pasal 180 ayat 1 UU Pilkada. Pasal ini mengatur, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon kepala daerah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp 72 juta.

Pasal 180 ayat 1 juga dikenakan untuk kasus di Kepulauan Aru. Pasal 180 ayat 2 juga ditambahkan, setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menghilangkan hak seseorang menjadi calon kepala daerah atau meloloskan calon yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 96 bulan, serta denda



Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo

paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp 96 juta.

Sementara Kasus di Rejang Lebong, Bengkulu dikenakan Pasal 184 UU Pilkada juncto Pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Pasal 184 itu berisi ketentuan, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau menggunakan surat palsu untuk persyaratan menjadi kepala daerah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp 72 juta.

Sedangkan, ketentuan UU 8/2019 yang dikenakan tersebut terkait perlindungan jamaah haji dan petugas haji. Perlindungan atas warga negara Indonesia di luar negeri, hukum, keamanan, serta jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. (Ist)



Niyimas Bunga Cinta

**SKATER CILIK INDONESIA DAPAT
PENGHARGAAN DARI BARBIE**

Barbie tahun ini ingin menginspirasi anak perempuan untuk mengejar mimpi di bidang olahraga dengan memberi penghargaan kepada sosok panutan dalam bidang tersebut.

Di Indonesia, penghargaan itu diberikan kepada atlet muda Nyimas Bunga Cinta.

Nyimas adalah pemain skateboard yang berkompetisi di Asian Games 2018 dan menjadi peraih medali termuda sepanjang sejarah Asian Games 2018 pada usia 12 tahun, ketika ia memenangi medali perunggu.

Nyimas juga telah memenangkan medali emas di Vans Park Series Regional Asia dan medali perak di SEA Games 2019.

Nyimas juga senantiasa berbagi pengalaman dan motivasi yang bertujuan untuk menginspirasi anak perempuan dan laki-laki dan untuk mempromosikan skateboard di Indonesia.

“Seiring dengan para atlet wanita terus membuat rekor baru dan menjadi pusat perhatian di seluruh dunia, kami dengan bangga memberikan penghargaan kepada para wanita luar biasa ini dengan mengangkat kisah dan prestasi mereka,” kata Lisa McKnight, SVP dan Global Head Barbie and Dolls, Mattel, dalam siaran resmi, Senin.

“Dalam upaya untuk memperkecil kesenjangan mimpi, kami memiliki

tanggung jawab untuk menunjukkan kepada para anak perempuan bahwa mereka dapat menjadi apa saja yang mereka inginkan, baik di dalam dan di luar lapangan, bahkan lebih dari itu.”

Terinspirasi dari gaya Tokyo yang tak tertandingi dalam bidang mode, Barbie memasuki dunia Olimpiade dengan menghadirkan lima cabang olahraga baru yang akan ditambahkan dalam program olimpiade.

Bunga Nyimas Cinta lahir pada 13 April 2006, putri dari pasangan suami-isteri Didiet Rio dan Ika Damayanti. Ia sulung dari tiga bersaudara.

Rasa penasarannya terhadap skateboard berawal karena melihat video aksi skateboarder di media sosial sejak kelas 2 SD. Ia kemudian sering mencoba-coba papan beroda itu, berulang kali terjatuh hingga menangis. Namun, Bunga terus bangkit dan bermain lagi.

“Skateboard is fun, menyenangkan,” kata Nyimas tentang alasannya memilih olahraga itu.

Nyimas makin serius menekuni skateboard ketika duduk di kelas 5 SD. Bakatnya terus diasah dengan bantuan Anthony Adam Caya, yang menjadi pelatihnya di skatepark Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Anthony adalah salah satu legenda hidup skateboarder Indonesia. Ia lebih dikenal dengan nama Tony Sruntul, dan

kini juga menjadi Presiden Skateboard Indonesia.

Sebelum menang di nomor street skateboard AG 2018, ia meraih medali perunggu pada kejuaraan Vans Park Series Asia Continental di Singapura pada awal Agustus tahun ini. Nyimas berada di ranking ketiga dengan perolehan 120 poin di nomor park.

Meski masih menjadi atlet belia, beberapa perusahaan sudah mensponsori dirinya seperti DC Shoes, Green Skate Lesson, Dsruntul Skateshop, Etaks Store, Noore Sport, Scratch Skateboards, Crossing Socks dan Kabau Artshades.

Nyimas awalnya bercita-cita menjadi dokter. Namun, dia telah mantap memilih skateboard sebagai pilihan hidup dan ingin tampil di banyak kejuaraan. Salah satunya adalah di Olimpiade 2020 Tokyo, Jepang, di mana skateboard juga akan dipertandingkan untuk pertama kali di ajang olahraga dunia.

“Saya target ingin tampil di olimpiade,” katanya sambil tersenyum.

Pilihan Nyimas untuk menekuni skateboard mendapat dukungan dari orangtuanya, bahkan turut mengubah hidup ayahnya.

Menurut Didiet, tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat buah hatinya giat berlatih olahraga yang dicintainya dengan sepenuh hati (1st).



Foto : bola.com



AMANKAH MASKER BUATAN SENDIRI?

Masker N99 dan N95 memang paling jitu dalam menangkal paparan virus berdasarkan banyak penelitian, tapi bagaimana dengan masker buatan sendiri?

Amanda Wilson, seorang kandidat doktor ilmu kesehatan lingkungan di Universitas Arizona, AS, melakukan penelitian bersama rekan-rekannya mengenai efektivitas penggunaan masker di lingkungan terkontaminasi.

Dalam *Journal of Hospital Infection* mereka memaparkan hasil studinya bahwa risiko seseorang terpapar virus akan sangat tergantung pada masker yang dikenakan dan berapa lama ia berada di lingkungan terkontaminasi.

Ketika para peneliti membandingkan memakai masker dengan tidak menggunakan perlindungan selama paparan virus selama 20 menit 30 detik, mereka menemukan bahwa risiko infeksi berkurang 24-94 persen atau 44-99 persen tergantung pada masker dan durasi paparan.

"Masker N99, yang bahkan lebih efisien dalam menyaring partikel udara daripada masker N95, jelas merupakan salah satu opsi terbaik untuk memblokir virus, karena mereka dapat mengurangi risiko rata-rata sebesar 94-99 persen untuk paparan 20 menit dan 30 detik."

"Tetapi masker jenis itu bisa sulit didapat, dan ada pertimbangan etis seperti membiarkan itu tersedia bagi para profesional medis," kata Wilson, dikutip dari *Scitech Daily*, Senin.

Selain N99 dan N95, para peneliti juga menguji masker dari bahan lain yang di antaranya banyak dibuat sendiri di rumah tangga maupun industri rumahan.

Menurut studi mereka, masker dari bahan seperti sejenis penyaring teh, kain katun-campuran, dan sarung bantal antimikroba adalah yang terbaik berikutnya untuk perlindungan.

Kain selendang, yang mengurangi risiko infeksi sebesar 44 persen setelah 30 detik dan 24 persen setelah 20 menit, dan kaos katun keefektifannya hanya sedikit lebih baik daripada tidak memakai masker sama sekali, mereka menemukan.

"Kami tahu bahwa masker berfungsi, tetapi kami ingin tahu seberapa baik dan membandingkan berbagai efek bahan pada hasil kesehatan," kata Wilson, yang berspesialisasi dalam penilaian risiko mikroba kuantitatif.

Wilson dan timnya mengumpulkan data dari berbagai penelitian tentang efektivitas masker dan menciptakan model komputer untuk mensimulasikan risiko infeksi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

"Salah satu komponen besar risiko adalah berapa lama Anda (di lingkungan) terpapar. Kami membandingkan risiko infeksi pada 30 detik dan 20 menit di lingkungan yang sangat terkontaminasi," katanya.

Kondisi lain yang berdampak pada risiko infeksi adalah jumlah orang di sekitar Anda dan jarak mereka dari

Anda, katanya.

Ukuran tetesan (droplet) pengangkut virus dari bersin, batuk atau bahkan bicara juga merupakan faktor yang sangat penting. Tetesan yang lebih besar dan lebih berat membawa virus keluar dari udara lebih cepat daripada tetesan yang lebih kecil dan lebih ringan. Itulah salah satu alasan jarak membantu mengurangi paparan.

"Ukuran aerosol juga dapat dipengaruhi oleh kelembaban," kata Wilson. "Jika udaranya lebih kering, maka aerosol menjadi lebih cepat lebih kecil. Jika kelembaban lebih tinggi, maka aerosol akan tetap lebih besar untuk periode waktu yang lebih lama."

"Itu mungkin terdengar bagus pada awalnya, tapi kemudian aerosol itu jatuh di permukaan, dan objek itu menjadi rute paparan potensial lainnya."

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan seseorang dalam lingkungan di mana virus hadir, masker menjadi kurang efektif.

"Semakin padat serat suatu material, semakin baik saringannya. Itu sebabnya jumlah utas yang lebih tinggi mengarah pada kemanjuran yang lebih tinggi," katanya.

"Selain itu, kami fokus pada masker yang melindungi pemakainya, tetapi mereka paling penting untuk melindungi orang lain di sekitar Anda jika Anda terinfeksi. Jika Anda menempatkan lebih sedikit virus di udara, Anda menciptakan lingkungan yang kurang terkontaminasi di sekitar Anda." (Ant).



TIKTOK DI TENGAH PUSARAN KONTROVERSI KEAMANAN DATA

TikTok adalah salah satu platform media sosial yang perkembangannya paling cepat di dunia. Aplikasi dari ByteDance asal China itu memungkinkan penggunaannya untuk membuat video pendek berdurasi 15 detik disertai musik, filter, dan beberapa fitur kreatif lainnya.

Berdasarkan analisis aplikasi Sensor Tower, per Juni 2020 TikTok mencetak pendapatan \$90,7 juta dolar AS, atau sekitar Rp1,3 triliun, meroket 8,3 kali lipat dibandingkan dengan Juni 2019.

Namun, platform berbagi video kreatif ini belakangan menjadi sorotan, karena disinyalir mengeksploitasi data penggunaannya.

Platform tersebut dituding mengirimkan data pengguna yang berhasil dikumpulkan ke sejumlah pihak di negara asalnya, China.

Selain itu, ada pula tuduhan kegagalan menghapus video dan informasi pribadi tentang pengguna anak-anak yang usianya kurang dari 13 tahun di Amerika Serikat.

India telah memblokir TikTok dan

puhulan aplikasi lainnya dengan alasan mengancam privasi maupun keamanan nasional. Amerika Serikat juga tengah menajajaki kemungkinan mengikuti langkah India.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan, negaranya mungkin memblokir TikTok dan aplikasi lain yang dibuat oleh China dan menuding aplikasi itu menjadi alat mata-mata Beijing.

Terkait dengan tuduhan itu, melalui sebuah tulisan dalam blog resminya, pihak TikTok menegaskan bahwa perusahaan tetap menjaga kerahasiaan data pengguna dan akan terus menjamin keamanannya.

TikTok menyimpan database yang berlokasi di luar China. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu tunduk pada regulasi ketat yang dibuat oleh pemerintah China.

“Di TikTok, kami menangani masalah ini dengan sangat serius. Kami berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam cara kami mendukung pengguna TikTok kami di AS dan di seluruh dunia,” demikian pernyataan itu.

TikTok mengaku memiliki tim khusus yang secara teknis mengawasi kebijakan keamanan siber, serta praktik privasi dan keamanan data.

Lantas, bagaimana sebaiknya kita menyikapi permasalahan tersebut? Terlebih belum ada regulasi yang konkret mengatur perlindungan data pengguna platform digital di Tanah Air.

Terkait dengan keamanan data pengguna TikTok yang menimbulkan kekhawatiran, Richard Tyler Blevins streamer gim ternama asal AS yang dikenal dengan nama Ninja diketahui telah menghapus aplikasi TikTok di perangkatnya beberapa hari lalu.

Penghapusan aplikasi TikTok dari semua perangkatnya ini melalui akun Twitter miliknya. Menurutnya, aplikasi itu dianggap berbahaya karena konsep pengumpulan datanya tidak wajar.

Salah satu bank di Amerika Serikat Wells Fargo & Co. meminta para karyawannya untuk menghapus TikTok dari ponsel mereka lantaran kekhawatiran tentang keamanan aplikasi tersebut (Ist)



Mau ke Salon Saat Pandemi?

JANGAN LUPAKAN PROTOKOLNYA

Perawatan kesehatan dan kecantikan salah satu kebutuhan banyak orang terutama perempuan. Sayangnya saat pandemi Covid-19, lokasi umum termasuk salon pun dikatakan sebagai zona yang berisiko tinggi penularan. Jangan khawatir, dengan protokol kesehatan yang tepat, perawatan agar bisa tetap tampil kiclong tetap bisa dinikmati.

Jasa perawatan kesehatan dan kecantikan seperti salon, barber shop, atau tukang cukur rambut semua masuk kategori fasilitas umum. Nah, tempat-tempat tersebut berpotensi menjadi area penularan Covid-19, karena menimbulkan kontak antara pemberi jasa, pelayanan, pelanggan, dan juga di beberapa tempat akan berpotensi menimbulkan kerumunan pelanggan.

Tim Komunikasi Publik, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Dokter Reisa Broto Asmoro mengatakan, untuk tetap menjaga fasilitas dan pelayanan jasa tersebut tetap aman dari Covid-19,

maka perlu adanya penerapan protokol kesehatan.

Adapun protokol kesehatan tersebut antara lain, pelaku usaha wajib menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer. "Bisa memakai sabun atau hand sanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses oleh pelanggan atau pengunjung, dan mewajibkan semua orang yang akan masuk harus mencuci tangan terlebih dahulu," kata Reisa belum lama ini.

Reisa juga meminta pengelola salon, barbershop dan jasa perawatan kecantikan lainnya agar melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. "Nah, kalau ditemukan pekerja, atau pelanggan, atau pengunjung dengan suhu di atas 37,3 derajat Celcius, dan sudah diperiksa sebanyak 2 kali dengan jarak 5 menit di antara pemeriksaan, dan mereka memiliki gejala penyakit, maka tidak diperkenankan untuk masuk," jelasnya.

Selain itu, pada saat melakukan pelayanan jasa, pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri, berupa masker, pelindung wajah atau face shield, atau pelindung mata, dan juga celemek, se-

lama mereka bekerja. Mereka juga wajib menyemprotkan disinfektan pada kursi setelah digunakan pelanggan. Hal ini dilakukan sebagai tindak pencegahan persebaran virus corona.

Sedangkan untuk pengunjung semua wajib menggunakan masker, dan tidak boleh dilepas selama perawatan berlangsung. Selanjutnya dianjurkan tidak ada peralatan yang digunakan secara bersamaan, seperti handuk, celemek, atau alat potong rambut, dan lain sebagainya.

Kemudian apabila terdapat alat yang harus dipakai secara berulang, maka harus disanitasi. Peralatan dan bahan tersebut dapat dicuci, bisa menggunakan deterjen, atau disterilkan dengan disinfektan. (DRM)

Jaga jarak juga harus diterapkan. Jika kamu diminta menunggu oleh petugas salon, hindari duduk di kursi bertanda X. Tetap jaga jarak aman dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter. Patuh aturan ya!(ist)



Berharap (dari hal 1)

Kenapa corona mengganas di Jawa Timur? Warga kurang patuh pakai masker, kurang tegasnya aturan di Kota Surabaya--sebagai 'hotspot' wabah--belum optimalnya pelacakan warga terinfeksi dinilai menjadi beberapa faktor pemicunya. Dan ternyata, makin mengganasnya wabah corona di Jatim membuat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sejak Minggu (12/7).

"Iya betul, Pak Menkes 'ngantor' di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur," kata Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesdirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes dr. M. Budi Hidayat, Senin (13/7).

Hidayat menuturkan, Jawa Timur mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terkait kasus COVID-19. Sebab Jatim merupakan provinsi dengan kasus terbanyak di Indonesia. "Karena kita tahu penyebaran COVID-19 di sini perlu perhatian khusus," ucap Hidayat. Hidayat menuturkan, Terawan sudah tiba di Jatim sejak Sabtu (11/7). Sebelumnya, Terawan sempat melakukan kunjungan kerja ke Semarang.

Lebih lanjut, Hidayat menyebut mantan Kepala RSPAD itu langsung menggelar rapat bersama Kepala Dinas Kesehatan Jatim Herlin Ferliana dan Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahyono di hari pertamanya berkantor di Jatim. Setelah rapat, Terawan langsung meninjau Rumah Sakit Lapangan Indrapura.

Salah satu lokasi penyebaran corona terbaru yang mengejutkan adalah perusahaan media. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto, mengatakan pihaknya akan segera melakukan tracing di tiga kantor media di Surabaya, Jawa Timur.

Hal itu menyusul beredarnya informasi adanya sejumlah awak di TVRI, Metro TV dan RRI Surabaya yang terkonfirmasi positif corona. "RRI, Metro TV dan TVRI. Harus di-tracing kita kesana untuk mengecek sekaligus melakukan tracing," kata Irvan yang juga Kepala BPB dan Linmas Surabaya ini, Senin (13/7).

Tim tracing juga akan melanjutkan pelacakan hingga ke tingkat kontak erat dan keluarga para pegawai media. "Kalau memang betul yang kita lakukan adalah tracing, rapid test dan swab. Bukan hanya pegawai, tapi juga keluarga akan kita tracing," ujarnya.

Sementara ini, kata Irvan, di salah satu kantor media telah dilakukan penyemprotan cairan disinfektan, oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.

Sebelumnya beredar informasi yang menyebutkan bahwa sejumlah karyawan di tiga media di Surabaya diduga terkonfirmasi

positif corona. Rinciannya 53 orang dari RRI, 3 orang dari Metro TV dan 2 orang dari TVRI Surabaya.

Kepala Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Surabaya Sumarlina membenarkan informasi tersebut. Hal itu, kata dia, berdasarkan hasil swab pada 26 Juni lalu, di mana 54 pegawai RRI positif Covid-19. Hasil swab tersebut baru diketahui 11 Juli.

Kepala TVRI Jatim Akbar Sahidi membenarkan ada dua orang karyawannya meninggal. Namun belum dipastikan terinfeksi corona karena masih menunggu hasil laboratorium. Selain dua orang tersebut, empat orang staf TVRI yang lain sudah menjalani rapid test dan hasilnya reaktif. TVRI saat ini masih menunggu hasil tes laboratorium.

Jokowi Minta Sanksi Dipertegas

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin adanya sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Jokowi menyoroti ada wilayah yang 70% di antaranya tidak bermasker.

"Yang kita siapkan sekarang ini untuk ada sanksi. Karena yang kita hadapi sekarang ini protokol kesehatan yang tidak dilakukan secara disiplin. Misalnya pakai masker di sebuah provinsi kita survei ada 30 persen. Yang 70 persen nggak pakai masker," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (13/7).

Pemerintah masih menyusun regulasi yang mengatur sanksi. Jokowi mengatakan dan ini masih sebatas wacana, sanksi bisa berupa kerja sosial. "Jadi kita siapkan baru pada posisi regulasi yang bisa memberikan sanksi. Masih kita bicarakan, dalam bentuk denda, mungkin dalam bentuk kerja sosial atau dalam bentuk tipiring. Masih dalam pembahasan saya kira itu akan berbeda," ujarnya.

Meski demikian, Jokowi optimistis dengan mengatakan puncak Corona di Tanah Air sekitar bulan Agustus-September berdasarkan perkiraan terakhir. "Kalau melihat angka-angka memang nanti perkiraan puncaknya ada di Agustus atau September, perkiraan terakhir," katanya.

Namun semuanya bisa berubah lagi jika tidak ada langkah signifikan. Untuk itu, Jokowi meminta kepada menteri untuk bekerja ekstra. "Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya bisa angkanya berbeda. Oleh sebab itu saya minta pada para menteri untuk bekerja keras," ujar Jokowi.

Pemerintah kembali mengumumkan perkembangan kasus positif virus Corona

(COVID-19) di Indonesia. Per hari ini, ada penambahan 1.282 kasus positif Corona, sehingga total menjadi 76.981 kasus.

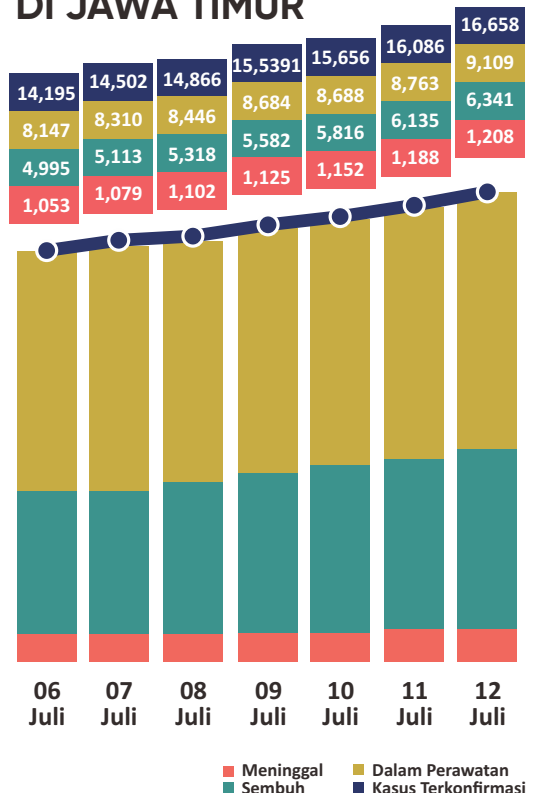
Jakarta Memburuk Lagi

Terpisah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan positivity rate Covid-19 di Jakarta selama periode 6 sampai 12 Juli 2020 adalah 5,5 persen. Angka tersebut melebihi ambang batas ideal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni kurang dari 5 persen.

"Dalam periode satu minggu terakhir yaitu 6-12 Juli 2020, telah dilakukan 3.569 tes per 1 juta penduduk per minggu. Positivity rate testing PCR seminggu terakhir yaitu 5,5 persen. Menurut WHO, positive rate idealnya berkisar kurang dari 5 persen," kata Dwi dalam keterangan tertulis, Senin (13/7).

Dwi mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang dikenal dengan sebutan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak. Tujuannya adalah memutus mata rantai penyebaran Covid-19. "Meningkat 55 persen dari pasien positif yang ditemukan adalah orang tanpa gejala, untuk itu, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat tetap melakukan protokol 3M lawan Covid," ujar Dwi. (ist)

JUMLAH POSITIF COVID-19 DI JAWA TIMUR



NEKAT MASUK MEKAH TANPA SURAT IZIN, BAKAL DIDENDA RP 38 JUTA

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengkonfirmasi akan memberlakukan denda 10 ribu riyal atau Rp 38 juta bagi mereka yang melanggar aturan larangan masuk Kota Mekah tanpa izin selama musim Haji. Arab Saudi membatasi jumlah jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini karena pandemik virus corona.

Situs english.alarabiya.net dikutip Senian (13/7) mengutip sebuah pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi menyatakan hukuman denda berlaku mulai 19 Juli sampai 2 Agustus 2020. Hukuman denda akan dinaikkan dua kali lipat menjadi 20 ribu riyal atau Rp 77 juta bagi mereka yang mengulangi kesalahan.

"Kementerian Dalam Negeri menyerukan kepada seluruh warga Arab Saudi dan mereka yang tinggal di negara itu agar mematuhi instruksi pada musim haji tahun ini. Aparat keamanan akan mulai melakukan tugas mereka berjaga di jalan-jalan dan arah menuju Masjidil Haram untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta upaya memasuki area tempat pelaksanaan ibadah haji selama periode khusus ini," demikian bunyi pernyataan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi.

Pada pelaksanaan haji 2020, Arab Saudi membatasi jumlah jamaah yang boleh melaksanakan ibadah haji karena tingginya risiko pandemik virus corona. Dengan alasan keamanan tersebut, maka pelaksanaan ibadah haji 2020 hanya menerima sekitar 10 ribu jamaah.

Haji adalah salah satu rukun Islam, yang harus dilakukan seorang umat Muslim setidaknya sekali dalam seumur hidup. Pada tahun lalu, ada 2,5 juta jamaah melaksanakan ibadah haji ke di Mekah dan Madinah. Tahun ini, Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi mengatakan ritual itu akan terbuka hanya untuk individu, dari berbagai kebangsaan yang tinggal di Arab Saudi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Tawfiq al-Rabiah mengatakan para peziarah akan diuji untuk virus corona sebelum tiba di kota suci Makkah. Dan akan diminta untuk karantina di rumah



setelah ritual. Dia mengatakan tidak seorang pun di atas usia 65 atau dengan penyakit kronis akan diizinkan untuk melakukan haji pada tahun ini.

Ini adalah pertama kalinya dalam hampir 90 tahun sejarah Arab Saudi pengunjung asing dilarang melakukan haji. Haji telah dibatalkan karena perang dan epidemi pada masa lalu sepanjang sejarah jazirah Arab. Namun tidak pernah ada pembatalan ibadah haji sejak berdirinya Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932.

Sebelum pengumuman penangguhan ibadah haji, pemerintah Indonesia, Malaysia, Senegal dan Singapura telah melarang warganya untuk melakukan haji pada 2020 karena masalah virus

corona.

Kementerian Agama Indonesia mengumumkan pada awal Juni membatalkan ibadah Haji 2020 karena pandemi virus corona. "Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau 2020," kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam konferensi pers virtual, Selasa, 2 Juni 2020.

Fachrul Razi mengatakan pandemi ini berdampak pada semua aspek sosial keagamaan. Kementerian lalu membentuk pusat krisis Haji 2020. Pusat krisis ini diberi mandat untuk mitigasi penyelenggaraan haji 2020.

Menurut Fachrul Razi, Arab Saudi tak kunjung membuka akses haji untuk negara manapun. "Sehingga pemerintah tak punya waktu menyiapkan," kata dia. Akhirnya pemerintah RI memutuskan meniadakan keberangkatan Ibadah Haji 2020. Indonesia adalah pengirim jamaah haji terbesar di dunia dan sebelum pembatalan berencana mengirim 220.000 jamaah Haji ke Arab Saudi. (ist)

DAFTAR NEGARA TAK KIRIM JAMAAH HAJI



Singapura

- Waktu keputusan : **15 Mei 2020**
- Jumlah calon jamaah : **900 orang**
- Alasan : Mencegah penularan covid-19



Indonesia

- Waktu keputusan : 2 Juni 2020
- Jumlah calon jamaah : 221 ribu orang
- Alasan :
 - Tidak pastinya penyelenggaraan haji dari Arab Saudi sementara persiapan mepet
 - Mencegah penularan covid-19



India

- Waktu keputusan : **15 Mei 2020**
- Jumlah calon jamaah : **900 orang**
- Alasan : Mencegah penularan covid-19



Malaysia

- Waktu keputusan : **15 Mei 2020**
- Jumlah calon jamaah : **900 orang**
- Alasan : Mencegah penularan covid-19



Brunei Darussalam

- Waktu keputusan : **15 Mei 2020**
- Jumlah calon jamaah : **900 orang**
- Alasan : Mencegah penularan covid-19



Afrika Selatan

- Waktu keputusan : **15 Mei 2020**
- Jumlah calon jamaah : **900 orang**
- Alasan : Mencegah penularan covid-19